



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,93 / 98,23%

Jumlah	188 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 78	
	PEREMPUAN : 110	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 9	Diploma 3 : 0
	SMU : 99	S1 : 79
	Diploma 1 : 0	S2 : 0
		S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 52	SWASTA : 28
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 6
	POLRI : 4	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 98	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? | 3,862 |
| 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ? | 3,883 |
| 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? | 3,910 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Bahwa dalam memberikan layanan kepada penerima layanan, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa menerapkan biaya sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan, sebagaimana sudah diatur dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Simalungun.
2. Bahwa Produk spesifikasi jenis pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan produk hasil layanan sesuai dengan spesifikasi jenis pelayanan yang dimintakan pengguna layanan. Dengan adanya petugas PTSP di setiap bagian seperti Petugas PTSP bagian Umum, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kasir, Petugas Meja Ecourt dan Inzage serta Petugas Piket maka pengguna layanan dapat dengan mudah memperoleh produk layanan yang dimohonkan sesuai bagiannya masing masing.
3. Bahwa waktu pelayanan tetap diberikan sesuai dengan SOP yang berlaku. Adapun SOP yang berlaku di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sudah diperbaharui sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan SK Pemberlakuan Nomor 31/KPN.W2-U16/SK.HM1.1.1/III/2026 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Simalungun. Apabila terjadi ketidaksesuaian waktu pelayanan maka petugas akan memberikan alasan yang jelas dan tepat langsung kepada pengguna layanan serta adanya kompensasi layanan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

31 Maret 2026
Ketua Pengadilan Negeri